

MANAJEMEN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PESANTREN SALAFIYAH DI PONDOK PESANTREN DARUL AMIN PALANGKA RAYA

Nour Padila¹, Ahmadi², Slamet Riyadi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: dpadila29@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v11i2.1924>

Sections Info

Article history:

Submitted: 27 January 2026

Final Revised: 11 February 2026

Accepted: 16 March 2026

Published: 30 April 2026

Keywords:

Management

Education

Equality

Salafiyah



ABSTRAK

This study aims to describe the management of the Equality Education Program in Salafiyah Islamic Boarding Schools (PKPPS) at Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya, focusing on the Wustho level. The study is motivated by the gap between students' need for formal educational recognition and the dominance of religious learning in salafiyah pesantren. Although previous studies have examined PKPPS, most have focused on program evaluation based on policy compliance, with limited attention to the operational management aspects, particularly planning and implementation at the institutional level. This limitation indicates a significant research gap, especially in the context of pesantren outside Java. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that program management has been implemented through systematic planning involving internal coordination and external collaboration with the Ministry of Religious Affairs. The implementation combines diniyah (religious) activities and general academic learning based on the 2013 Curriculum. However, an imbalance in time allocation between religious and academic learning was identified, indicating that curriculum integration has not yet been optimal. The novelty of this study lies in its in-depth analysis of PKPPS management at the micro level of pesantren, particularly within the local context of Central Kalimantan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya pada jenjang Wustho. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kebutuhan santri terhadap pengakuan pendidikan formal dengan dominasi pembelajaran keagamaan di pesantren salafiyah. Meskipun berbagai studi sebelumnya telah mengkaji PKPPS, sebagian besar berfokus pada evaluasi program berbasis kebijakan dan belum secara mendalam menelaah aspek manajemen operasional, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan di level satuan pendidikan. Keterbatasan ini menunjukkan adanya research gap yang signifikan, terutama pada konteks pesantren di luar Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen program telah dilaksanakan melalui perencanaan yang melibatkan koordinasi internal dan eksternal dengan Kementerian Agama, serta pelaksanaan pembelajaran yang memadukan kegiatan diniyah dan akademik dengan mengacu pada Kurikulum 2013. Namun, ditemukan ketidakseimbangan alokasi waktu yang menyebabkan integrasi kurikulum belum optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap aspek manajerial PKPPS pada level mikro pesantren, khususnya dalam konteks lokal Kalimantan Tengah.

Kata kunci: manajemen, pendidikan, kesetaraan, salafiyah

PENDAHULUAN

Pondok pesantren dengan segala fenomenanya merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Lembaga pendidikan Islam ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan institusi pendidikan lainnya, baik dari aspek sejarah dan perkembangannya, komponen kelembagaan, hingga pola pendidikannya. (Darussalam & Pendidikan, 2020)

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada dalam lingkungan pesantren. Namun, tidak semua santri di pesantren, khususnya pesantren salafiyah, memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan formal. Banyak santri yang fokus mendalami ilmu-ilmu agama tetapi belum memiliki ijazah pendidikan formal setara SD, SMP, atau SMA. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi tuntutan administratif di dunia kerja atau pendidikan tinggi yang mensyaratkan ijazah formal.

Pesantren merupakan bagian dari struktur internal pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarakan secara tradisional yang telah menjadikan Islam sebagai cara hidup. Sebagai bagian struktur internal pendidikan Islam Indonesia, pesantren mempunyai kekhasan, terutama dalam fungsi sebagai institusi pendidikan, disamping sebagai lembaga dakwah bimbingan kemasyarakatan, bahkan perjuangan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang sangat melekat kuat dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Karakteristik yang hingga saat ini masih melekat kuat pada diri pesantren, di mana ia secara kontinu melayani kebutuhan pendidikan masyarakat.

Dalam proses pembelajaran, siswa seringkali ditekankan untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan mengesampingkan keahlian/keterampilan. Padahal pada era milenial ini, seiring dengan perkembangan jaman, adanya modernisasi yang ditandai dengan semakin majunya sistem teknologi, komunikasi dan sektor ekonomi. Masyarakat akan bersaing satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan menunjukkan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya.

Pendidikan nonformal sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti sangat berperan di sini, pendidikan nonformal membantu menemukan jalan keluar dari masalah yang menjadi beban masyarakat diantaranya seperti keterbatasan biaya dan asumsi pendidikan bukan hal segalanya. Pendidikan nonformal didalamnya berupaya untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dapat secara berjenjang dan berstruktur, mengembangkan kecakapan hidup untuk belajar sepanjang hayat, salah satunya adalah pendidikan kesetaraan. Program kesetaraan terdapat di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal (sekolah). Pendidikan nonformal juga berfungsi mengembang kan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. (Ahmad et al., 2022)

Pendidikan Kesetaraan ini merupakan terobosan penting dalam sistem pendidikan nasional yang mengakui kesetaraan pembelajaran di pesantren salafiyah dengan pendidikan formal. Program Pendidikan Kesetaraan mengintegrasikan kurikulum pendidikan agama pesantren dengan kurikulum pendidikan umum, sehingga santri dapat memperoleh ijazah yang setara dengan Paket B (setara SMP/MTs). Landasan hukum program ini tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 26 ayat (3) yang menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal. Program ini berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning).

“Islamic educational reform in Southeast Asia evolved through intellectual networks that enabled modernization without abandoning core religious traditions.” Temuan ini memperkuat bahwa modernisasi pesantren bukanlah bentuk disrupsi tradisi, melainkan proses transformasi bertahap. (Azra, 2004)

Sejumlah penelitian mengenai Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) telah dilakukan di berbagai daerah. Mengevaluasi PKPPS menggunakan model CIPP dan menemukan bahwa program berjalan baik pada aspek konteks, proses, dan produk, meskipun aspek input masih perlu penguatan. Nurkhasanah (2023) menggunakan model Countenance Stake dalam mengevaluasi PKPPS tingkat Wustho dan menekankan pentingnya kesesuaian antara input dan proses. Sofyan (tesis) juga menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara pembelajaran diniyah dan umum menjadi tantangan utama dalam implementasi PKPPS. (Andespa, 2021)

Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek evaluasi program berdasarkan kesesuaian dengan Juknis PKPPS dan standar kebijakan nasional. Namun, masih terbatas kajian yang secara spesifik menganalisis manajemen operasional program pada level satuan pendidikan, khususnya pada aspek perencanaan dan pelaksanaan di konteks lokal pesantren salafiyah luar Pulau Jawa.

Kajian internasional mengenai pendidikan Islam dan pendidikan nonformal menunjukkan bahwa lembaga pesantren merupakan institusi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebijakan pendidikan nasional. (Dhofier, 1999) menjelaskan bahwa “pesantren represent a unique indigenous Islamic educational institution that maintains classical Islamic scholarship while selectively adapting to social change.” Dalam konteks ini, kepemimpinan kyai tidak hanya berfungsi sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan strategis dalam pengelolaan kurikulum dan keberlanjutan lembaga.

Manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan individu-individu untuk memutuskan, menguraikan, dan mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan kapasitas dan mengatur fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia/kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). (Handoko, 1998)

Program yang dikaitkan manajemen dapat dipahami bahwa manajemen program adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengelola sumber daya dalam suatu aktivitas yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut para ahli yang ringkas oleh Ridwan bahwa manajemen program merupakan upaya dalam pengelolaan koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian dari sekelompok tenaga pendidik untuk mencapai tujuan dan manfaat program yang efektif dan efisien.

Pengertian manajemen juga terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. As-Sajadah ayat 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut

perhitunganmu”.

Pelaksanaan dalam manajemen tidak boleh dilakukan secara asal, karena setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Ayat ini menegaskan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menuntut integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan. Rencana tanpa komitmen hanya menjadi teori tanpa dampak. Karena itu, pemimpin dan pengelola dituntut tidak sekadar berjanji atau merancang program, tetapi juga merealisasikannya dengan sungguh-sungguh. Manajemen yang baik menuntut kejujuran, komitmen, dan eksekusi nyata sebagai landasan etis dan spiritual.

Penelitian ini baru karena secara khusus menelaah perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya. Fokus pada jenjang Wustho memberikan keunikan, sebab tahap ini menjadi transisi strategis bagi santri. Kontribusi ilmiahnya adalah memperkaya teori manajemen pendidikan Islam berbasis pesantren dengan konteks nyata, sekaligus memberi rujukan praktis bagi pesantren lain dalam menyusun strategi pendidikan kesetaraan yang sistematis dan adaptif terhadap tantangan zaman. Unsur kebaruan merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian karena unsur kebaruan yang didapatkan tersebut akan memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. (Haqqi, 2023)

Pertanyaan penelitian mengenai pendidikan kesetaraan tingkat Wustho di Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya sangat penting untuk dijawab karena pembelajaran pada Kesetaraannya merupakan inti dari pendidikan pesantrennya yang berfungsi membentuk kemampuan santri dalam memahami sumber-sumber klasik keislaman. Pada tingkat Wustho, santri berada pada tahap transisi yang krusial, di mana mereka mulai diarahkan menuju pemahaman teks yang lebih mendalam, sistematis, dan mandiri. Oleh karena itu, mengetahui bagaimana proses manajemen pembelajarannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, metode, media, hingga evaluasi akan memberikan gambaran sejauh mana kualitas pendidikan pesantren berjalan serta bagaimana upaya peningkatannya dapat dilakukan. Penelitian ini juga penting sebagai dasar pengembangan model pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan santri masa kini.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya berfokus pada evaluasi kesesuaian program terhadap pedoman teknis, tetapi secara khusus menganalisis aspek manajemen program, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, penelitian ini mengkaji konteks lokal Kalimantan Tengah yang masih relatif minim penelitian terkait PKPPS, sehingga memberikan kontribusi geografis yang signifikan dalam khazanah studi pendidikan pesantren. Penelitian ini juga memusatkan analisis pada jenjang Wustho sebagai fase transisi strategis bagi santri, yang menentukan keberlanjutan pendidikan mereka baik dalam ranah keagamaan maupun akademik. Di samping itu, kajian ini menelaah integrasi Kurikulum 2013 dalam sistem pesantren salafiyah serta mengidentifikasi persoalan keseimbangan kurikulum melalui perspektif manajemen beban pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian pada aspek manajerial PKPPS di tingkat mikro (pesantren) sekaligus memperkaya literatur manajemen pendidikan Islam nonformal berbasis pesantren salafiyah.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) umumnya hanya berfokus pada evaluasi program (menggunakan model CIPP, *Countenance Stake*, dll.), namun belum ada yang secara spesifik mengkaji aspek manajemen operasional, terutama perencanaan dan pelaksanaan di level satuan pesantren, khususnya di luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan Tengah. Ini menjadikan penelitian ini layak dan mendesak untuk dilakukan.

Di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah terdapat Pondok Pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya yang salah satu didalamnya terdapat program kesetaraan tingkat wustho atau disebut paket B. Membahas mengenai program kesetaraan, penyelenggaraan program kesetaraan paket B di Pondok Pesantren Darul Amin dirancang untuk membekali para santri belajarnya dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, ilmu agama dan kecakapan untuk dimanfaatkan dalam Menempuh Pendidikan Selanjutnya tanpa meninggalkan ilmu agamanya. Program paket B merupakan salah satu jalan yang memberikan kesempatan kepada warga belajar usia remaja yang karena berbagai sebab tidak melanjutkan pendidikan.

Agar pendidikan dapat menghasilkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan handal, maka diperlukan suatu pengelolaan / manajemen pendidikan yang tepat di dalam programnya serta dapat meningkatkan mutu pendidikan didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan bagaimana Proses Manajemen Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pesantren Salafiyah di Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam manajemen program pendidikan kesetaraan (PKPPS) di Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya. Penelitian bertempat di Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya yang beralamat di jalan G. Obos IX/Yakut I No. 18 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan interaktif model melalui melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagaimana menurut Miles dan Huberman (1992:16), yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data displays), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verifivacation).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan program pendidikan kesetaraan di pondok pesantren Darul Amin Palangka Raya

Perencanaan adalah kumpulan keputusan-keputusan awal yang akan dilaksanakan. Planning adalah suatu proses untuk untuk menentukan Plan (rencana), diproses oleh planner (perencana), dan hasilnya adalah plan (rencana). George R. Terry dalam Hasibuan (1987, hlm.95) Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan kebenaran serta membuat dan memanfaatkan praduga mengenai jangka panjang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengorganisasian menurut Siagian dalam Sudjana (2000, hlm.114), memberikan batasan-batasan pengorganisasian sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari kumpulan individu, instrumen, tugas, wewenang dan tanggungjawab, alat dan tenaga ahli sedemikian rupa sehingga menjadikan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan.

George R. Terry dalam Hasibuan (2004, hlm.183) mengemukakan pelaksanaan adalah untuk membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bersemangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Menurut Sudjana (2004, hlm.207), fungsi pelaksanaan adalah untuk mewujudkan tingkat penampilan dan partisipasi yang tinggi dari setiap pelaksanaan yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Menurut Earl P Strong dalam Malayu Hasibuan (2004, hlm.241) Pengendalian/pengawasan adalah proses

pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang di lakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sutomo, 2012, hlm.16). Syamsu Mappa (1984) dalam Djudju Sudjana (2006, hlm.21) Memberikan pengertian bahwa evaluasi program pendidikan di luar sekolah adalah suatu gerakan yang dilakukan untuk memutuskan berhasil dan tidaknya suatu program pendidikan. Sedangkan Stake (1975) dalam Djudju Sudjana (2006, hlm.21) menguraikan bahwa evaluasi program adalah tindakan untuk menjawab suatu program yang telah, sedang, dan akan diaktualisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara proses penyusunan perencanaan program kesetaraan di pondok pesantren Darul Amin Palangka Raya Perencanaan program ini didasari oleh kekusaran para pengurus pondok pesantren pada saat itu, mengingat adanya perbedaan karakteristik antara pembelajaran tahfiz Al-Qur'an dan pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, dilakukan perencanaan yang mencakup penyusunan kurikulum pembelajaran, penetapan tenaga pendidik, penentuan mata pelajaran yang diajarkan, serta penentuan lokasi pelaksanaan pembelajaran. Seluruh aspek tersebut dikoordinasikan melalui rapat internal bersama pengurus pondok pesantren. Setelah tercapai kesepakatan di tingkat internal, pengurus pondok kemudian melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Palangka Raya, khususnya melalui bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS). Hasil dari koordinasi tersebut adalah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) yang mencakup penetapan Nomor Statistik Pesantren (NSP) serta legalitas wakaf pondok, sehingga izin operasional program dapat berjalan secara resmi dan diakui oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Uno hamzah, Pembelajaran yang akan direncanakan memerlukan berbagai teori untuk merancangnyanya agar rencana pembelajaran yang disusun benar-benar dapat memenuhi harapan dan tujuan pembelajaran. (Uno, 2023)

Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip integrasi kurikulum belum sepenuhnya optimal. Secara ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori instructional load, di mana dominasi satu jenis aktivitas pembelajaran akan membatasi kapasitas kognitif peserta didik untuk menyerap materi bidang lainnya. Oleh karena itu, pembagian waktu dan keseimbangan antara kegiatan keagamaan dan akademik perlu dirancang ulang agar tujuan pendidikan kesetaraan tercapai secara efektif.

(Ernawati, 2020) tentang Manajemen Program Tahfidz Al-Qur'an Ma'had Al-Jami'ah Putri IAIN Palangka Raya menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang sistematis, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi internal yang berkelanjutan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya fungsi manajerial dalam menjaga mutu dan konsistensi pelaksanaan program berbasis keagamaan.

(Fullan, 2016) menegaskan bahwa "*educational change depends not merely on policy design but on implementation capacity at the school level.*" Artinya, keberhasilan program kesetaraan sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial di tingkat pesantren.

a. Perencanaan Pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan

Perencanaan pembelajaran merupakan pengambilan keputusan atas berbagai pilihan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dimana perencanaan mengandung rangkaian putusan dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan materi ajar, penggunaan media, penggunaan pendekatan dan metoda pengajaran, serta penilaian dalam suatu alokasi

waktu untuk mencapai kompetensi tertentu yang telah dirumuskan (Novalita, 2014:59). Sedangkan menurut pendapat Sabirin (2012:117) perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar serta mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu. (Widiyanto & Wahyuni, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara, tujuan program ini adalah mencetak kader santri tahfiz Al-Qur'an yang memiliki kredibilitas serta penguasaan hafalan yang mumpuni. Dengan demikian, ketika santri lulus dari pondok pesantren, mereka telah memiliki bekal hafalan Al-Qur'an yang kuat sebagai dasar pembentukan karakter dan keilmuan keislaman. Di sisi lain, pihak pondok pesantren tidak ingin sepenuhnya melepas santri ke dalam sistem pembelajaran formal tanpa dibekali pendidikan agama yang memadai. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pondok pesantren mengintegrasikan pembelajaran agama dengan pendidikan umum yang mengacu pada Kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional.

Penggunaan Kurikulum 2013 dimaksudkan agar santri tetap memperoleh kompetensi akademik yang diakui secara formal, sehingga apabila di kemudian hari mereka ingin melanjutkan studi ke sekolah umum maupun lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, santri telah memiliki dasar keilmuan yang cukup. Meskipun capaian akademik tersebut mungkin tidak sepenuhnya setara dengan peserta didik yang menempuh pendidikan formal secara penuh, setidaknya santri memiliki keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pesantren modern maupun salafiyah yang mengintegrasikan beberapa kurikulum sekaligus membutuhkan manajemen yang sistematis agar tidak terjadi ketimpangan beban belajar. (Agustin et al., 2025)

(Lukens-Bull, 2005) menegaskan bahwa *"Islamic boarding schools in Indonesia do not reject modernity; rather, they negotiate identity and modernity by incorporating secular subjects and state-recognized curricula while preserving religious identity."* Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kurikulum nasional dalam sistem pesantren merupakan bentuk negosiasi institusional, bukan bentuk sekularisasi.

Secara Teori menurut (Yunus & Alam, 2015) pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Penerapan kurikulum 2013 memungkinkan para guru merencanakan, melaksanakan, menilai kurikulum serta hasil belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar, sebagai cermin penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari.

(Tan, 2014) juga menegaskan bahwa *"Indonesian Islamic schools demonstrate a dynamic synthesis between traditional religious pedagogy and modern national curricula."* Integrasi Kurikulum 2013 dalam sistem pesantren salafiyah merupakan bentuk sintesis dinamis tersebut.

Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan di Pondok Peantren Darul Amin Palangka Raya

Pelaksanaan kegiatan belajar memerlukan pengaturan yang cermat. Merujuk pada pendapat tersebut, maka penyusunan jadwal belajar sekolah merupakan bagian penting

dalam pelaksanaan kurikulum dan penyelenggaraan pembelajaran. Penyusunan jadwal belajar sekolah merupakan tanggung jawab manajemen sekolah untuk menjalankan fungsi dan tugas pokok sekolah. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk membantu pengelolaan kegiatan sekolah merupakan salah satu wujud tanggung jawab manajemen sekolah yang baik (Pribadi & Yunus, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dibagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu kegiatan diniyah (keagamaan) dan kelas pendidikan kesetaraan umum. Kegiatan diniyah dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin hingga Jumat, dimulai dari pagi hingga sore hari, yang difokuskan pada penguatan ilmu-ilmu keagamaan program unggulan tahfidz dan kitab kuning serta pembentukan karakter santri. Sementara itu, kegiatan kelas kesetaraan umum dilaksanakan pada hari Sabtu dari pagi hingga sore hari, dengan tujuan memberikan pembelajaran akademik sesuai dengan kurikulum pendidikan kesetaraan. Pembagian waktu pembelajaran tersebut dirancang sebagai upaya pondok pesantren dalam menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, sehingga santri tetap memperoleh bekal keilmuan keislaman yang kuat sekaligus kompetensi akademik yang diakui secara formal.

(Bush, 2020) Menyatakan bahwa "effective educational institutions require clear planning, distributed leadership, and systematic evaluation to achieve institutional goals." Dalam konteks pesantren, fungsi perencanaan dan pelaksanaan menjadi krusial karena lembaga harus mengelola dua sistem pembelajaran sekaligus: diniyah dan akademik formal.

Dari aspek pelaksanaan, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan menggunakan sistem multi-shift, yaitu kegiatan diniyah berjalan pada hari kerja dan kegiatan kesetaraan umum pada akhir pekan. Pendekatan ini menyesuaikan ritme kehidupan santri di pesantren yang padat dengan aktivitas keagamaan. Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran yang digunakan antara lain halaqah dan bandongan untuk pelajaran agama, sedangkan mata pelajaran umum menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Pelaksanaan ini sudah sesuai dengan prinsip efektivitas pendidikan nonformal yang fleksibel dan adaptif.

Ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren Darul Amin sangat bergantung pada kesiapan manajerial, perencanaan terstruktur, dan dukungan sumber daya. Hal ini selaras dengan teori manajemen pendidikan yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan ditentukan oleh keseimbangan antara fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Qomar, 2016)

Dalam pelaksanaan, jika dilihat dari hasil penelitian, setiap kegiatan dan aspek yang telah direncanakan sebelumnya dan penugasan untuk seluruh elemen di Pondok Pesantren Darul Amin Kota Palangka Raya telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing secara efektif dan efisien. Terlihat dari pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan program yang telah berjalan sesuai dengan silabus dan rencana pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya.

Secara teori, praktik ini dapat dikaitkan dengan temuan (Sofyan, n.d.) yang mengevaluasi program PKPPS tingkat Wustha di tiga pesantren di Bekasi menggunakan model Countenance Stake. Ia menemukan bahwa keberhasilan pendidikan kesetaraan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara input dan process, terutama dalam hal kualifikasi guru dan penerapan metode pembelajaran adaptif. Hasil tersebut sejalan dengan kondisi di Pondok Pesantren Darul Amin, di mana koordinasi internal lembaga dan dukungan Kementerian Agama menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas program. Namun, baik pada penelitian tersebut maupun penelitian ini, masih ditemukan ketidakseimbangan

kurikulum yang disebabkan oleh dominasi pelajaran tahfidz dibandingkan mata pelajaran umum. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa prinsip integrated curriculum management belum sepenuhnya berjalan sebagaimana idealnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip integrasi kurikulum belum sepenuhnya optimal. Secara ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori instructional load, di mana dominasi satu jenis aktivitas pembelajaran akan membatasi kapasitas kognitif peserta didik untuk menyerap materi bidang lainnya. Oleh karena itu, pembagian waktu dan keseimbangan antara kegiatan keagamaan dan akademik perlu dirancang ulang agar tujuan pendidikan kesetaraan tercapai secara efektif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Program Pendidikan Kesetaraan (PKPPS) di Pondok Pesantren Darul Amin Palangka Raya telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang cukup sistematis. Perencanaan program dilakukan melalui koordinasi internal pengurus pondok serta kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Palangka Raya, yang menghasilkan legalitas resmi berupa Nomor Statistik Pesantren dan izin operasional program pendidikan kesetaraan.

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan dilakukan dengan membagi kegiatan pembelajaran menjadi dua bentuk utama, yaitu kegiatan diniyah yang dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat, serta kelas kesetaraan umum yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Pembelajaran kesetaraan umum mengacu pada Kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional, sehingga santri memperoleh kompetensi akademik yang diakui secara formal tanpa meninggalkan identitas keagamaan pesantren. Metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik pendidikan nonformal dan kehidupan pesantren yang fleksibel.

Meskipun secara umum program telah berjalan dengan baik, penelitian ini menemukan adanya ketidakseimbangan antara porsi pembelajaran keagamaan dan pembelajaran akademik umum, yang berpotensi memengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi dan penataan ulang alokasi waktu pembelajaran agar integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum dapat berjalan lebih seimbang dan efektif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pesantren lain dalam mengelola program pendidikan kesetaraan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustin, Y., Sapuadi, S., & Hikmah, N. (2025). MANAJEMEN KURIKULUM PROGRAM TAHFIDZ DI PONDOK PESANTREN AL WAFA PUTRI PALANGKA RAYA. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 1880–1892.
- Ahmad, A., Sari, A. J. T., Wardana, A. H., Rosyid, M. N. I., Widiyanto, E., & Rasyad, A. (2022). Tren Perkembangan Pendidikan Non-Formal. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 7(2), 76–82.
- Andespa, R. (2021). Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang. *Studia Manageria*.
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulam?' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. University of Hawaii Press.
- Budaya, K. I. B. P. D., Insan, D. D. P. P. H., & Raya, F. T. K. P. (2020). *Kepemimpinan Pesantren*.
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management*.
- Darussalam, J., & Pendidikan, J. (2020). *KEPEMIMPINAN PESANTREN Kajian Integrasi*

Budaya Pesantren Dan Budaya Dayak Di Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta'limiddin Kota Palangka Raya Ahmadi. XI(2), 424–448.

- Dhofier, Z. (1999). *The pesantren tradition: The role of the kyai in the maintenance of traditional Islam in Java*. Monograph Series Press, Program for Southeast Asian Studies, Arizona State
- Ernawati, E. (2020). Manajemen program tahfidz Al-Qurâ€™™ an maâ€™™ had al-jamiah putri IAIN Palangka Raya. *IAIN Palangka Raya*.
- Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change*. Teachers college press.
- Handoko, T. H. (1998). *Manajemen*.
- Haqqi, A. (2023). Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: sebuah kajian literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam sebuah penelitian. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan, 29(2), 221–230.*
- Lukens-Bull, R. (2005). *A peaceful jihad: Negotiating identity and modernity in Muslim Java*. Springer.
- Pribadi, A., & Yunus, M. (2016). Penyusunan jadwal belajar sekolah menengah yang efektif memanfaatkan komputerisasi simulasi. *SENTIA 2016, 8(1)*.
- Qomar, M. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Erlangga.
- Sofyan, A. (n.d.). *Evaluasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) tingkat wustho (tingkat SMP) model countenance stake se Kota-Bekasi*.
- Tan, C. (2014). Educative tradition and Islamic schools in Indonesia. *Journal of Arabic and Islamic Studies*.
- Uno, H. B. (2023). *Perencanaan pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Widiyanto, I. P., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi perencanaan pembelajaran. *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen, 4(2), 16–35.*
- Yunus, H., & Alam, H. V. (2015). *Perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013*. Deepublish.

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

